

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Fenomena sosial yang memiliki dampak cukup signifikan bagi pembangunan berbagai sektor di beberapa negara termasuk Indonesia adalah korupsi. Syed Hussein Alatas dalam buku *Sosiologi Korupsi* menjelaskan korupsi sebagai suatu penyalahgunaan kepercayaan dengan mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik melalui penyalahgunaan norma-norma tugas, yang diiringi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan perbuatan kejam dengan konsekuensi yang di derita oleh masyarakat luas. Tindakan korupsi yang melanggar nilai dan hukum ini, juga mencakup tindakan penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme dan gratifikasi.¹

Berdasarkan laporan dari organisasi yang fokus bergerak di bidang anti korupsi yaitu *Transpaency Internasional* (TI), tingkat korupsi Indonesia yang diukur melalui skor *Corruption Perception Index* (CPI) tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Skor CPI telah banyak dijadikan referensi bagi Negara-negara di dunia, dalam menggambarkan situasi korupsi suatu Negara secara periodik per tahun sejak diluncurkan pada tahun 1995. CPI dipresentasikan dalam bentuk skor 0-100, dimana skor 0 dipresepsikan bahwa Negara sangat korup sementara 100

¹Syed Hussein Alatas, 1982, *Sosiologi Korupsi (Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer)*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 12.

dipresepsikan Negara sangat bersih dari korupsi. Apabila suatu Negara memiliki skor CPI kurang dari 50, maka hal ini menandakan bahwa Negara tersebut memiliki masalah korupsi di sector publik yang serius.

Tabel I.1

Peringkat dan Skor Corruption Perception Indeks Negara Tahun 2018

Ranking Dunia	Negara	Skor <i>Corruption Perception Indeks (CPI)</i>
1	Denmark	88
2	New Zealand	87
3	Finland	85
4	Singapore	85
14	Hongkong	76
18	Japan	73
61	Malaysia	47
89	Indonesia	38
178	Syria	13
180	Somalia	10

(Sumber : *Transparency Internasional (TI)*, 2018)

Tabel I.1 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 89 dengan skor CPI yaitu 38.² Ada peningkatan satu skor CPI bila dibandingkan dengan tahun 2017 lalu yakni 37, dimana mengubah posisi ranking CPI Indonesia dengan skala dunia dari peringkat 96 menjadi peringkat 89. Meskipun skor CPI Indonesia mengalami pergerakan satu tingkat di tahun 2018, namun indeks skor tersebut menunjukkan bahwa hingga kini Indonesia masih berada pada posisi jauh dari cerminan Negara yang bersih dari praktik korupsi. Indeks skor CPI mengilustrasikan

² Transparency Internasional. "*Corruption Perception Index 2018*". [Transparencyinternasional.org](https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdf) (10 Februari 2019)

https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_Executive_Summary.pdf

tentang adanya lingkaran berbahaya antara kemiskinan dan korupsi.³ Selain itu, indeks skor CPI Indonesia menandakan bahwa negara ini masih memiliki masalah korupsi di sektor publik yang serius dan memiliki tugas besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tabel I.2
Angka Tindak Pidana Korupsi Pejabat Publik

JABATAN	2014	2015	2016	2017	2018
Anggota DPR dan DPRD	9	19	23	20	103
Kepala Lembaga/ Kementerian	9	3	2	0	1
Komisioner	0	0	0	0	0
Gubernur	3	3	1	1	2
Walikota/Bupati dan Wakil	12	4	7	13	30
Eselon I/II/III	2	7	8	43	24
Hakim	2	3	1	3	5
Jumlah Keseluruhan	37	39	42	80	165

(Sumber : ACCH Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)

Sektor-sektor publik yang seharusnya menyediakan berbagai layanan baik kepada masyarakat nyatanya memiliki masalah pada oknum-oknum yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sektor publik tersebut. Tabel I.2 menunjukkan bahwa jumlah pejabat publik yang terjerumus kasus korupsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sepanjang laporan tentang tindak pidana korupsi pejabat publik, tahun 2018 menjadi tahun dengan jumlah pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi paling tinggi.⁴ Dalam hal ini perlu disadari bahwa sektor-sektor publik telah diduduki oleh para pemangku kepentingan oligarki yang korup.

³Singgih, 2002, *Dunia pun Memerangi Korupsi*, (Jakarta: Pusat Study Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan), hlm, 115.

⁴ACCH KPK. "Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan". Acch.kpk.go.id (12 Febuari 2019) <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Tingginya pejabat publik yang terjerumus dalam kasus korupsi menandakan bahwa permasalahan korupsi telah terjadi secara sistemik. Semakin meluasnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, maka semakin luas dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Tindakan tersebut turut serta merugikan keuangan Negara bahkan merebut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang semester 1 tahun 2018, negara mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 1,09 triliun dan nilai suap sebesar Rp 42,1 miliar. Sebagian besar yang berdampak pada nilai kerugian negara tersebut di dasari atas penyalahgunaan wewenang.⁵ Tindakan korupsi menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan di masyarakat. Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan publik nyatanya terhalangi karena telah di salah gunakan oleh para wakil rakyat yang korup.

Fenomena korupsi telah terjadi hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat dan mendapat perhatian dari semua pihak. Berbagai dampak korupsi yang merugikan masyarakat diantaranya melanggengkan kemiskinan, meningkatkan jumlah pengangguran, meningkatkan hutang luar negeri, penyebab kerusakan alam dan berdampak pada bidang kehidupan sosial-budaya yaitu menimbulkan “biaya sosial” yang tinggi.⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian harapan masyarakat untuk hidup lebih baik karena harus terhalangi oleh adanya fenomena

⁵Reza Jurnaliston. “Catatan ICW soal Penindakan Korupsi Semester I 2018”. Kompas.com (11 Februari 2019). <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018>

⁶ Syahroni, dkk, 2018, *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit*, (Yogyakarta : Deepublish), hlm,70.

korupsi. Hingga saat ini korupsi menjadi salah satu masalah sosial yang sulit untuk diselesaikan.

Korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan pada umumnya.⁷ Dalam mengatasi permasalahan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang, penegakkan hukum hingga pembentukan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga independen yang fokus memberantas praktek korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Berbagai upaya pemberantasan korupsi tersebut perlu mendapat apresiasi, namun hal ini belum dapat menghilangkan praktek-praktek korupsi.

Pemberantasan korupsi masih belum menemukan titik terang, karena fenomena ini masih belum dijadikan sebagai musuh bersama. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa oknum sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga independen KPK yang bekerja dalam memberantas korupsi di negeri ini. Bukan hanya itu, faktor lain yang menyebabkan permasalahan korupsi masih sulit untuk diberantas karena masih rendahnya masyarakat yang memiliki perilaku anti korupsi. Dalam artian masyarakat masih berfikir dan memiliki sikap yang tidak peduli bahkan cenderung membiarkan tindakan korupsi. Berawal dari tidak adanya pengetahuan dan sikap anti korupsi membuat keadaan korupsi

⁷Ita Suryani, 2015, Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif penvegahan korupsi, *Jurnal Visi Komunikasi*/Volume 14, No.02, November 2015, hlm 285.

semakin meluas. Argumen penulis diatas diperkuat oleh pernyataan Syed Hussein Alatas yang menyatakan bahwa “*Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena korupsi masih marak terjadi adalah kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi*”.⁸

Keprihatinan dan kekecewaan masyarakat atas fenomena korupsi memunculkan gerakan-gerakan di masyarakat. Masyarakat berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui gerakan sosial. Dalam hal ini, gerakan sosial dilakukan dengan tujuan untuk melakukan suatu perubahan sosial dengan cara membangun kesadaran kolektif dan membudayakan anti korupsi. Gerakan sosial anti korupsi ini sebagai upaya kolektif yang berkelanjutan dalam mendorong masyarakat untuk ikut terlibat melakukan aksi sosial guna menanggulangi masalah korupsi melalui berbagai komunitas.

Komunitas-komunitas yang terlibat memiliki pandangan yang sama terhadap masalah korupsi sehingga memunculkan suatu tindakan kolektif melalui gerakan anti korupsi. Aksi kolektif dalam gerakan anti korupsi bukan hanya dapat dilakukan melalui kampanye, tetapi dapat juga dilakukan melalui berbagai macam cara salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi secara garis besar merupakan

⁸Syed Hussein Alatas, *Op.Cit.*, hlm, 98.

pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada masyarakat.⁹

FLAC (*Future Leader for Anti-Corruption*) hadir sebagai gerakan yang berjuang dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi. FLAC sebagai salah satu komunitas tersebar di berbagai wilayah, menjadi partner pemerintah melakukan aksi kolektif dalam memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk membangun kesadaran dan membudayakan nilai-nilai anti korupsi dalam memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Melalui pendidikan anti korupsi masyarakat tentunya akan diberikan pengetahuan mengenai persoalan korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Gerakan sosial anti korupsi melalui pendidikan ini akan memberikan pengaruh pada pola pikir, mengubah cara pandang maupun perilaku masyarakat untuk memiliki sikap anti korupsi, sehingga penulis disini tertarik untuk menulis mengenai “Gerakan sosial anti korupsi melalui pendidikan (Studi pada Komunitas *Future Leader for Anti-Corruption* FLAC).”

I.2 Permasalahan Penelitian

Fenomena korupsi telah dianggap sebagai masalah sosial yang telah banyak merugikan Negara dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggaran dana yang seharusnya dapat tersalurkan untuk sektor-sektor publik yang membutuhkan, tetapi tidak dapat digunakan dengan maksimal

⁹Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, 2014, “*Pendidikan Anti korupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah/Madrasah*”, (Bandung : ALFABETA), hlm,7.

karena telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hingga saat ini fenomena korupsi masih merupakan masalah yang masih sulit untuk diberantas. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi penyakit sosial dimana tindakan tersebut telah terjadi pada semua sektor kehidupan dan telah dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Merespon hal tersebut muncul keterlibatan masyarakat yang melakukan gerakan-gerakan sosial dengan tujuan melakukan suatu perubahan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi. Dalam gerakan sosial ini, komunitas *Future Leader Anti-Corruption* (FLAC) sebagai gerakan anti korupsi berupaya untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap korupsi dan membentuk karakter generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi daya tarik peneliti adalah gerakan anti korupsi melalui pendidikan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu pada gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas *Future Leader Anti-Corruption* sebagai wadah pembelajaran anti korupsi yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk memiliki sikap anti korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi agar lebih terarah melalui bentuk pertanyaan-pertanyaan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas *Future Leader for Anti-corruption* sebagai bagian dari gerakan sosial anti korupsi?
2. Bagaimana komunitas *Future Leader for Anti-corruption* sebagai gerakan sosial baru?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara spesifik penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas *Future Leader for Anti-corruption* sebagai bagian dari gerakan sosial anti korupsi.
2. Menganalisis komunitas *Future Leader for Anti-corruption* sebagai gerakan sosial baru.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian sosiologi gerakan sosial baru, gerakan anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Penelitian ini juga menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut untuk

menambahkan dan mengembangkan pengetahuan sosiologi kajian gerakan sosial baru dan pendidikan anti korupsi. Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca mengenai gerakan anti korupsi melalui pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi dan memperluas pengetahuan dalam kajian gerakan anti korupsi. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

I.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Guna membantu menulis penelitian ini, penulis menggunakan beberapa studi pustaka yang dijadikan referensi bagi penulis dan dianggap relevan. Studi pustaka ini diambil berdasarkan kesesuaian dengan subjek, objek dan tema penelitian penulis yaitu tentang gerakan anti korupsi, gerakan sosial baru dan pendidikan anti korupsi. Studi pustaka ini juga diambil dari beberapa penelitian sebelumnya untuk mempermudah mengkonstruksi pemikiran penulis yang membantu penulisan penelitian ini.

Studi pustaka tentang penelitian-penelitian terkait dengan gerakan anti korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti baik nasional maupun internasional

sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Ponco Budi Sulistyو dan Azman Azwan Azmawati dengan judul *The Roles of Facebook In Creating New Anti-Corruption Social Movement Through Online Community In Indonesia* dalam bentuk Internasional Journal of Scientific and Reasearch Publications, Volume 6, Issue 7, July 2016, ISSN 2250-3153 pada tahun 2016.¹⁰ Jurnal ini membahas tentang keberadaan internet yang menciptakan sebuah media baru dalam gerakan sosial anti korupsi. Tulisan dalam jurnal ini berangkat dari permasalahan kekecewaan masyarakat yang membentuk gerakan anti korupsi melalui komunitas *online* di media sosial. Kekecewaan tersebut didasari atas kasus yang menimpa Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyadi yang di tangkap oleh pihak polisi karena dianggap telah mengalihkan perhatian publik dan mengganggu penyelidikan kasus korupsi.

Penelitian ini membahas mengenai gerakan anti korupsi yang muncul melalui medium media sosial sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyatakan aspirasinya maupun dalam membentuk asosiasi publik dalam mendukung gerakan anti korupsi. Sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan yakni bukan hanya melihat dari media sosial yang dapat memberikan pengaruh pada gerakan sosial, namun bagaimana pelaksanaan edukasi anti korupsi dapat berpengaruh juga bagi keterlibatan masyarakat dalam gerakan anti korupsi.

¹⁰Ponco B. Sulistyو dan Azman A. Azmawati, 2016, The Roles of Facebook In Creating New Anti-Corruption Sosial Movement Through Online Community in Indonesia. *Internasional Journal of Scientific and Reasearch Publications*, Volume 6, Issue 7, 2016, hlm, 12. Diakses dari www.ijsrp.org pada tanggal 8 Januari 2019.

Jurnal nasional lain yang membahas tentang gerakan anti korupsi yakni jurnal yang ditulis oleh Herlambang Septa Nugraha dan Yusuf Adam Hilman dengan judul *Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch* dalam bentuk Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.2 pada tahun 2018.¹¹ Jurnal ini berangkat dari permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia semakin terpuruk. Berdirinya lembaga KPK sebagai lembaga Negara yang independen, seiring perjalanan KPK banyak pihak yang berupaya untuk menghalangi hingga menghilangkan perannya dalam pelaksanaan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Merespon hal tersebut kemudian lahirlah gerakan dari masyarakat daerah dalam upaya pemberantasan korupsi seperti *Malang Corruption Watch*.

Malang Corruption Watch sebagai CSO yang bergerak dalam isu anti korupsi memiliki tiga strategi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu pencegahan, penegakkan hukum dan pendidikan anti korupsi. Peran dari *Malang Corruption Watch* adalah sebagai organisasi yang melakukan kontrol terhadap APBD wilayah malang, melakukan monitoring setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian *Malang Corruption Watch* juga berperan dalam mengadvokasi rakyat dan turut pula mengedukasi masyarakat melalui program sekolah anti korupsi. Penelitian penulis melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh

¹¹ Helambang Septa Nugraha dan Yusuf Adam Hilman, 2018, Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 2 ,2018, hlm. 10-24. Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/16857> pada tanggal 8 Januari 2019.

Herlambang karena fokus penelitian penulis pada gerakan yang dikolaborasikan dengan gerakan edukasi dan kampanye sosial anti korupsi melalui media sosial.

Jurnal internasional yang juga membahas tentang gerakan anti korupsi ditulis oleh Donatella Della Porta dengan judul *Anti-Corruption form Below: Social Movement Against Corruption in Late Neoliberalism* dalam bentuk jurnal *Open Journal of Sociopolitical Studies* , *PACO*, Issue 10(3) 2017: 661-692, ISSN 2035-6609 pada November, 2017.¹² Jurnal ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam dekade terakhir yang muncul dalam wujud gerakan sosial progresif yang memiliki relevansi dengan korupsi dengan menganalisis konsepsi gerakan sosial dengan mobilisasi dari bawah yang menentang korupsi, hubungan global dan antara praktik sehari-hari dan kekuatan bantuan gerakan. Penulis juga menggunakan pendekatan mobilisasi sumber daya dengan menekankan perlunya memobilisasi struktur yang dapat mengubah keluhan menjadi aksi kolektif. Gerakan sosial tersebut, muncul dari aktor-aktor yang berasal dari masyarakat sipil yang memiliki kesadaran untuk terlibat sebagai bagian dari aktor anti korupsi.

Della Porta dalam hal ini melihat protes disini bukan merupakan tindakan individu semata saja, namun membutuhkan organisasi yang merencanakan pilihan, koordinasi dan pilihan kolektif dengan strategi terbaik pelaksanaan gerakan sosial dengan merekrut anggota, mentaati komitmen dan memengaruhi opini publik.

¹²Donatella Della Porta, 2017, *Anti-Corruption form Below: Social Movement Against Corruption in Late Neoliberalism*, *Jurnal Open Journal of Sociopolitical Studies* , *PACO*, Issue 10(3) 2017: 661-692, ISSN 2035-6609, hlm, 661-692. Diakses dari <http://siba.ease.unisalento.it> pada tanggal 30 Desember 2019.

Bentuk gerakan sosial kontemporer ini juga melalui paradigma yang berbeda, karena persoalan korupsi bukan hanya dilihat sebagai masalah keadilan sosial saja melainkan harus juga ditangani secara kontekstual dalam hal ini yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang korupsi.

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang gerakan sosial ditulis oleh Abdi Rahmat dengan judul *Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin* pada tahun 2014.¹³ Dalam penelitiannya, jurnal ini berangkat dari permasalahan kemiskinan structural dan kebijakan Negara yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, dimana masih banyak anak-anak yang kurang mampu tidak bisa bersekolah dan menikmati pendidikan formal. Jurnal ini membahas tentang peran dari *Civil Society* yang melakukan gerakan sosial dengan mengangkat persoalan tentang pendidikan.

Aksi yang dilakukan oleh keempat *civil society* dikategorikan sebagai gerakan sosial baru yang merupakan suatu bentuk gerakan yang cenderung cultural, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tidak melibatkan aksi massa. Penelitian ini juga membahas sumber daya yang digunakan dalam melancarkan aksi gerakan sosial mereka bertumpu pada kemampuan mengembangkan jaringan sosial yang mereka miliki. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah dimana aktor

¹³Abdi Rahmat, 2014, *Gerakan dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah Untuk Anak Miskin*, Jakarta: *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 19, No. 1. Diakses dari www.journal.ui.ac.id/jsm pada tanggal 8 Januari 2019.

gerakan memperjuangkan masalah pendidikan, sedangkan penelitian penulis aktor gerakannya memperjuangkan gerakan anti korupsi.

Penelitian yang juga membahas tentang gerakan sosial dilakukan oleh Gunawan Wibisono dan Drajat Tri Kartono dengan judul *Gerakan Sosial Baru pada Musik: Studi Etnografi pada Band Navicula* pada tahun 2016.¹⁴Jurnal ini membahas mengenai gerakan yang dilakukan oleh grup Band Navicula dengan menggunakan produk budaya untuk menciptakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang lingkungan. Melalui aliran musik, terdapat lagu yang memiliki arti maupun makna tersendiri yang berusaha untuk disampaikan kepada para pendengarnya untuk suatu perubahan. Aksi sosial yang dilakukan Band Navicula menggunakan cara yang bersifat kultural dan kemanusiaan.

Penelitian Gerakan sosial baru yang dilakukan Band Navicula juga menjelaskan bahwa dalam suatu gerakan sosial baru dibutuhkan sebuah paradigma baru tentang aksi kolektif, sebuah model alternatif kebudayaan dan masyarakat, dan sebuah kesadaran diri yang baru dari komunitas-komunitas tentang masa depan mereka. Unit analisis GSB diantaranya adalah pesan yang disampaikan, paradigma baru aksi kolektif, refleksi pemberontakan kultural dan efek gerakan. Jurnal ini mencoba menghubungkan empat unit analisis GSB tersebut dengan praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh grup musik Navicula. Perbedaan penelitian penulis dengan

¹⁴Gunawan Wibisono dan Drajat Tri Kartono, 2016, Gerakan Sosial Baru pada Musik: Studi Etnografi pada Band Navicula, *Jurnal Anlisa Sosiologi* Volume 5, No. 2 Universitas Sebelas Maret, hlm, 70. Diakses dari, <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 9 Januari 2019.

penelitian ini adalah dimana aksi sosial yang dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat bersifat kultural dan kemanusiaan selain menggunakan medium musik juga dapat dilakukan melalui upaya edukasi.

Penelitian yang membahas tentang pendidikan anti korupsi ditulis oleh Mifdal Zusron Alfaqi dengan judul *Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti korupsi* pada tahun 2016.¹⁵ Jurnal ini mendeskripsikan mengenai pentingnya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan korupsi salah satunya melalui pendidikan anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi proses pembentukan karakter seorang dapat terbentuk dan membuka luas pemahaman masyarakat akan bahaya korupsi. Proses pendidikan anti korupsi juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga ke masyarakat. Penelitian penulis melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Mifdal karena fokus kepada gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas dalam menerapkan pendidikan anti korupsi.

Jurnal yang juga membahas tentang pendidikan anti korupsi yakni ditulis oleh Lukman Hakim dengan judul *Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam*

¹⁵ Mifdal Zusron Alfaqi, 2016, Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057, hlm, 19. Diakses dari <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/300/347>, pada tanggal 9 Januari 2019.

Kurikulum Pendidikan Islam pada tahun 2012.¹⁶ Dalam mengatasi permasalahan korupsi, keterlibatan pendidikan formal memiliki kedudukan yang strategis dan antisipatif. Sektor pendidikan formal memiliki peran dalam mendorong generasi muda dan menekan lingkungan di masyarakat agar tidak *permissive to corruption*. Dalam hal ini pendidikan formal turut berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi yakni dengan mengintegrasikan konsep pendidikan anti korupsi ke dalam aspek kurikulum mata pelajaran tertentu, terutama pendidikan agama islam.

Pada pendidikan anti korupsi yang menjadi kajian di dalamnya yakni untuk menanamkan pengetahuan mengenai bentuk korupsi dan aspek lainnya, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi dan membentuk kecakapan dan keterampilan baru untuk melawan korupsi. Dalam praktek mengenai penerapan pendidikan anti korupsi perlu mengintegrasikan domain pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). Pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif dalam pendidikan agama islam dengan memperhatikan materi (mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (model dan metode pengajaran sesuai karakter peserta didik), sumber belajar dan evaluasi. Kebermanfaatan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah memberikan gambaran tentang penerapan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi.

¹⁶Lukman Hakim, 2012, Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol. 10 No. 2, 2012, hlm, 141. Diakses dari http://jurnal.upi.edu/file/04_Model_Integrasi_Pendidikan_Anti_Korupsi-Lukman_Hakim.pdf pada tanggal 9 Januari 2019.

Tabel I.3
Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ponco Budi Sulistyono dan Azman Azwan Azmawati	2016	<i>The Roles of Facebook In Creating New Anti-Corruption Social Movement Through Online Community In Indonesia</i>	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang gerakan anti korupsi	Jurnal ini fokus pada gerakan anti korupsi yang dilakukan pada media sosial sedangkan penelitian penulis fokus pada gerakan anti korupsi melalui pendidikan
2	Herlambang Septa Nugraha dan Yusuf Adam Hilman	2018	Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang gerakan anti korupsi	Jurnal ini fokus pada peran <i>civil society organization</i> dalam gerakan anti korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada gerakan anti korupsi melalui pendidikan
3	Donatella Della Porta	2017	<i>Anti-Corruption form Below: Social Movement Against Corruption in Late Neoliberalism</i>	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang gerakan sosial anti korupsi	Jurnal ini fokus pada gerakan sosial anti korupsi global yang dilakukan oleh NGO yang bertindak dari bawah untuk melawan korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada gerakan anti korupsi melalui pendidikan
4	Abdi Rahmat	2014	Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu Pembahasan melihat tentang Gerakan Sosial, dalam hal ini adalah Gerakan Sosial Baru	Jurnal ini fokus pada aktor gerakan dalam memperjuangkan isu pendidikan sedangkan penelitian penulis actornya melakukan gerakan anti korupsi
5	Gunawan Wibosono dan Drajat Tri Kartono	2016	Gerakan Sosial Baru pada Musik: Studi Etnografi pada Band Navicula	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu Pembahasan melihat tentang Gerakan Sosial, dalam hal ini adalah Gerakan Sosial Baru	Jurnal ini fokus pada aktor gerakan dalam memperjuangkan isu lingkungan melalui produk kebudayaannya sebagai bentuk pemberontakan sedangkan penelitian penulis aktornya melakukan gerakan anti korupsi melalui pendidikan sebagai bentuk pemberontakan nilai untuk menumbuhkan kesadaran anti korupsi.

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Mifdal Zusron Alfaqi	2016	Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti korupsi	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang gerakan anti korupsi	Jurnal ini fokus pada peran pemuda dalam mencegah korupsi melalui pendidikan anti korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas dalam menerapkan pendidikan anti korupsi
7	Lukman Hakim	2012	Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam	Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penerapan pendidikan anti korupsi	Jurnal ini fokus pada peran pendidikan formal dalam implementasi pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan melalui mata pelajaran agama islam, sedangkan penulis fokus upaya menerapkan pendidikan anti korupsi.

(Sumber: Diolah dari tinjauan penelitian, 2019)

Beberapa tinjauan pustaka yang telah diambil oleh penulis untuk penelitian ini, penulis dapat menggali informasi yang relevan dalam mendukung penelitian yang dilakukan perihal gerakan anti korupsi melalui pendidikan yang dilakukan oleh *Future Leader for Anti-corruption*. Ketujuh penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam merangkai pola pikir yang sistematis dalam menyusun penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penulis juga mendapatkan beberapa gambaran terkait konsep serta memberikan gambaran pula mengenai teknik analisis data yang tepat dalam menuliskan ide-ide yang relevan dengan penulis.

I.6 Kerangka Konseptual

I.6.1 Gerakan Sosial dan Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial menurut Benford sebagai suatu aktivitas kolektif yang tersistem untuk menolak atau mewujudkan suatu perubahan mendasar bagi suatu kelompok atau masyarakat.¹⁷ Dalam buku sosiologi perubahan sosial, Wood & Jakson menjelaskan gerakan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok nonkonvensional dalam menciptakan atau menentang perubahan sebagaimana kelompok yang mempunyai derajat organisasi berbeda-beda dalam menciptakan atau mencegah tipe perubahan radikal atau reformis.¹⁸

Eyerman & Jamison berpendapat gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang kurang lebih terorganisir bertujuan melakukan perubahan sosial dengan kata lain sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi, komunitas atau sejenisnya berusaha mengungkapkan perasaan tidak puas di depan umum dengan tujuan mengubah basis sosial dan politik dari hal yang dikehendaki tersebut.¹⁹ Selanjutnya, aktivitas kolektif masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial harus memenuhi beberapa komponen, diantaranya:

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama,
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama,

¹⁷ Richard T. Schaefer, 2012, *Sociology*, (Jakarta : Salemba Humanika), hlm, 245.

¹⁸ Piotr Sztompka, 2008, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PRENADA), hlm, 326.

¹⁹*Ibid.*

3. Kolektivitasnya relative tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal,
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relative tinggi namun tidak terlembaga dan bentuknya konvensional.²⁰

Secara garis besar gerakan sosial memiliki tujuan untuk menciptakan suatu perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang hendak dicapai melalui gerakan sosial ini diklasifikasikan atas dasar target dan besarnya perubahan yang hendak di capai. Sebagaimana yang diklasifikasikan oleh David Arbele dalam buku James M. Henslin sebagai berikut:

Tabel I.4
Tipologi Gerakan Sosial

Target Perubahan	Besarnya Perubahan	
	Sebagian	Menyeluruh
Individu	Alteratif	Redemptif
Masyarakat	Reformatif	Transformatif

(Sumber: Arbele, 1966)

Arbele menjelaskan yang menjadi sasaran dari gerakan sosial tersebut terbagi menjadi dua. *Pertama* adalah individu, *Alterative Social Movement* merupakan suatu gerakan yang berusaha untuk mengubah perilaku tertentu. Dalam hal ini contoh yang dimaksud seperti pada awal tahun 1900-an muncul gerakan sosial *Women's Christian Temperance Union* yang bertujuan untuk merubah perilaku seseorang agar berhenti minum minuman keras. Selain itu *Redemptive Social Movement* juga menjadikan

²⁰ Syahrial Syarbaini, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm, 156.

individu sebagai sasaran perubahan, namun perubahan yang dimaksudkan berupaya mengubah perilaku seseorang secara menyeluruh. Sebagai contoh dalam gerakan sosial keagamaan yang merubah keseluruhan dari seseorang.

Kemudian sasaran kedua dari gerakan sosial menurut Arbele adalah masyarakat. *Reformative Social Movement* merupakan suatu gerakan sosial yang berupaya melakukan reformasi masyarakat dalam segi tertentu dengan lingkup yang terbatas sebagai contoh mereformasi masyarakat dalam memperlakukan binatang melalui gerakan yang memperjuangkan hak binatang. Selanjutnya *Transformatif Social Movement* yang berusaha mengubah tatanan sosial sesuai dengan kehendak yang dianggap baik oleh aktornya. Dalam hal ini contohnya adalah revolusi yang terjadi di koloni Rusia.²¹

Menurut Rajendra Singh, gerakan sosial pada dasarnya terbagi menjadi gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Dalam gerakan sosial lama lebih berorientasi pada wacana ideologis yang meneriakan anti kapitalis, revolusi kelas bahkan perjuangan kelas. Lain halnya dengan gerakan sosial baru yang pada umumnya tidak mendukung pada gagasan revolusi dan penggulingan sistem pemerintahan negara secara revolusioner. Gerakan sosial baru lebih mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan masyarakat untuk membela identitas atau warisan kultural

²¹James M. Henslin, 2007, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Edisi 6 Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga), hlm, 229-230.

mereka.²² Gerakan sosial baru hadir bukan didasari atas kepentingan kelas melainkan berjuang demi kepentingan kemanusiaan dalam bentuk yang lebih beragam seperti anti nuklir, anti rasisme, environmentalisme, pelucutan senjata, feminisme, regionalism, etnisitas dan kebebasan sipil.²³

Pendapat Henslin mengenai gerakan sosial baru sebagai kegiatan yang terorganisasi secara kolektif dengan membahas isu-isu mengenai nilai dan identitas sosial, serta pada perbaikan kualitas hidup. Gerakan sosial baru pada umumnya tidak berusaha untuk menggulingkan dan melihat pemerintah sebagai sekutu, melainkan mereka mencoba untuk mengkritik atau memprotes untuk memperjuangkan sebuah masyarakat yang lebih baik.²⁴ Menurut Pichardo dan Singh, gerakan sosial baru memiliki tampilan utama yang dianggap berbeda dengan gerakan sosial lama dalam media yang menghubungkan masyarakat sipil dan negara yang bertumpu pada ciri sebagai berikut:²⁵

1. Umumnya gerakan sosial menaruh konsepsi ideologis dengan asumsi bahwa masyarakat sipil berada pada kontrol negara. Namun keberadaan gerakan sosial baru melahirkan kesadaran baru bagi masyarakat sipil untuk melawan tindak pelanggaran terhadap publik yang dilakukan negara terhadap ruang kehidupan individu di dalam masyarakat. Gerakan sosial baru berupaya untuk

²²Rajendra Singh, 2010, *Gerakan Sosial Baru*, (Yogyakarta: Resist Book), hlm, 20.

²³*Ibid.*, hlm, 122.

²⁴James M Henslin, *Op.Cit.*, hlm, 249.

²⁵ Rajendra Singh, *Op.Cit.*, hlm,125-129.

menyuarakan kondisi adil dalam menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.

2. Gerakan sosial baru mengubah paradigma Marxian mengenai pengelompokan dan perjuangan yang di dasari atas konsep kelas dengan tujuan untuk menumbangkan posisi negara. Dalam hal ini gerakan sosial baru bergeser pada perjuangan seperti anti rasisme, pelucutan senjata, gerakan feminis dan lingkungan hingga pada gerakan lintas kelas.
3. Gerakan sosial baru secara umum merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil dengan membangkitkan isu-isu struktur seperti pada kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif daripada isu-isu yang bersumber dari perekonomian atau negara.
4. Struktur gerakan sosial baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi dan heterogenitas basis sosial masyarakat.

Pichardo menjelaskan lebih dalam mengenai gerakan sosial baru yang di muat dalam jurnal *New Social Movements: A Critical Review*, dimana menurut pandangannya gerakan sosial baru memiliki karakter yang sangat berbeda dengan gerakan sosial di masa lalu. Konteks gerakan ini lebih memfokuskan perhatian pada isu-isu humanis, kultural dan non-materialistis dengan aksi-aksi yang terbentuk dari

kepedulian masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam gerakan sosial baru ini memiliki karakteristik sebagai berikut: ²⁶

1. Ideologi dan Tujuan

Gerakan sosial baru memiliki karakteristik faktor sentral dengan pandangan ideologis berbedadan melekat pada gerakan sosial lama. Gerakan ini menepis asumsi-asumsi yang mengatasnamakan anti kapitalis, perjuangan kelas dan pengelompokkan di dasari pada konsep kelas seperti Marxian yang cenderung berusaha mengulingkan posisi pemerintah. Sedangkan dalam gerakan sosial baru memposisikan pemerintah sebagai partnernya untuk menekankan menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.

2. Taktik

Taktik dalam gerakan sosial baru lebih mencerminkan orientasi ideologi, dimana gerakan sosial baru lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik normal, dengan menggunakan taktik yang mengganggu mobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik dan cenderung untuk melakukan demonstrasi yang sangat dramatis. Gerakan sosial baru memiliki keyakinan pada karakter demokrasi yang modern dengan tidak representatif konsisten dengan orientasi taktis anti-institusionalnya. Gerakan ini menggunakan taktik berupa aksi-aksi dramatis yang berupaya untuk memobilisasi opini publik sehingga mendapatkan perhatian secara luas.

²⁶Nelson A. Pichardo, 1997, *New Social Movement: A Critical Review*, dalam *Annual Review of Sociology*. New York: State University of New York, 1997, hlm, 414-424. Diakses dari www.jstor.org pada tanggal 26 Maret 2019.

3. Struktur

Gerakan sosial baru memiliki bentuk anti institusional dengan ciri yang meluas bagaimana cara mereka mengatur. Gerakan ini berupaya untuk mereplikasi yang diwujudkan dalam organisasi mereka sendiri ke tipe perwakilan yang mereka inginkan. Dalam artian, mereka dapat mengatur diri sendiri dengan gaya cair untuk menghindari bahaya oligarki, merotasi kepemimpinan, memberikan suara secara komunal pada semua masalah mereka anggap sebagai karakter tidak manusiawi.

4. Partisipan

Gerakan sosial baru memiliki partisipan dari masyarakat kelas menengah yang memiliki komitmen ideologis. Partisipan gerakan sosial baru muncul dari kalangan kelas menengah baru yang bekerja di sektor ekonomi non produktif umumnya adalah kaum terdidik. Dalam hal ini partisipan yang terlibat pada gerakan ini tidak terikat dengan motif keuntungan melainkan untuk memperjuangkan terkait permasalahan sosial. Peserta gerakan ini tidak didefinisikan oleh batas-batas kelas tetapi ditandai oleh keprihatinan umum atas masalah sosial. Hal ini seperti komunitas berbasis ideologis, bukan etnis, agama, atau berbasis kelas.

I.6.2 Komunitas

Komunitas berasal dari kata dasar *communis* yang memiliki arti masyarakat, publik atau banyak orang. Komunitas bukan semata-mata kumpulan individu, tetapi

komunitas merupakan superorganisme yang mempunyai kebudayaan masyarakat umum. Komunitas terbentuk karena ada interaksi antara manusia yang mempelajari segala sesuatu karena keanggotaan mereka dalam kumpulan orang-orang tersebut. Dari apa yang mereka pelajari itu terbentuk enam dimensi komunitas yaitu teknologi, ekonomi, kekuasaan, kekuatan politik dan pola-pola sosial serta pertukaran nilai/gagasan/keyakinan yang seluruhnya dipelajari secara sosial dan tidak otomatis diwariskan atau ditransmisikan secara biologis.²⁷

Menurut Stephen Hill, terdapat 3 elemen yang dapat menjelaskan dari komunitas itu sendiri yakni; *pertama*, komunitas dapat dianggap sebagai kumpulan orang dengan struktur sosial tertentu. *Kedua*, rasa kepemilikan atau semangat komunitas. *Ketiga*, semua kegiatan sehari-hari komunitas digunakan untuk menandai rasa identitas yang mungkin terikat atau bahkan tidak terikat oleh lokasi geografis tertentu. Dalam hal ini komunitas dibentuk berdasarkan bagian dari anggotanya tersebut atau buka dari bagiannya.²⁸

Komunitas menurut Imam Moedjiono merupakan sebuah kelompok sosial terdiri dari berbagai organisme berbagi lingkungan, cenderung memiliki ketertarikan yang sama dimana individu-individu didalamnya memiliki maksud, sumberdaya, preferensi, kebutuhan, risiko kepercayaan dan beberapa kondisi lain yang serupa.

²⁷Alo Liliweri, 2014, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm,17.

²⁸Nicholas Abercrobie, Stephen Hill, Bryan S. Turner, 2010, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm, 98.

Selain itu, komunitas merupakan suatu bentuk kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan terdapat peraturan dan pembagian kerja.²⁹

I.6.3 Pendidikan Anti korupsi

Pendidikan anti korupsi dilaksanakan seiring dengan pembangunan negara yang bebas dari korupsi. Melihat permasalahan korupsi yang telah lama masuk ke dalam tataran kehidupan kebangsaan dan telah melanda semua lini, maka pendidikan anti korupsi harus menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.³⁰ Menurut Eko Handoyo, pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada masyarakat berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya tindakan korupsi.³¹

Menurut Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, pendidikan anti korupsi sebagai upaya yang dilakukan untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi melalui pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non-formal.³² Melalui pendidikan informal, pendidikan anti korupsi dilakukan dilingkup keluarga, kehidupan sosial dan berdasarkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi yang dilakukan setiap hari secara terus menerus. Kemudian

²⁹ Imam Moedjiono, 2002, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, (Yogyakarta: UII Press), hlm, 53.

³⁰Silfia Hanami, 2017, *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*, (Yogyakarta : Perpustakaan Nasional Katalog Dala Terbitan (KDT)), hlm, 177.

³¹Eko Handoyo, 2015, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), hlm, 33.

³²Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Op.Cit.*, hlm. 7.

dalam pendidikan formal, pendidikan anti korupsi dilakukan melalui kurikulum tersendiri, terintegrasi pada mata pelajaran lainnya dan dibudayakan oleh seluruh pihak dalam lingkup sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pemerintah lainnya. Selanjutnya dalam pendidikan non-formal, pendidikan anti korupsi dilaksanakan diluar lingkup sekolah formal atau pelebagaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial di masyarakat seperti teman sebaya, *peer group*, maupun komunitas-komunitas sosial lainnya yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Penekanan pendidikan anti korupsi yaitu untuk melakukan suatu perubahan yang telah terjadi di masyarakat dalam melahirkan generasi-generasi muda yang nantinya akan memimpin negara dengan memiliki bekal nilai-nilai guna menangkal korupsi. Adapun tujuan dari pendidikan anti korupsi sebagai berikut:³³

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya,
2. Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi,
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi di masyarakat.

Dalam pembelajaran anti korupsi, materi yang dimuat dalam pendidikan anti korupsi ini bukan hanya sebatas pada pengetahuan mengenai apa itu korupsi dengan berbagai macam bentuk dari tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi ini juga

³³Eko Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

memuat penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya menangkal sikap permisif generasi muda terhadap tindakan korupsi, dengan memperbaharui sistem nilai yang cenderung mentolerir cikal bakal korupsi. Untuk itu, sebagaimana nilai-nilai yang mesti dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Jujur

Menanamkan setiap individu dalam membangun kehidupan lainnya dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat untuk bertindak secara kelurusan hati dengan mengungkapkan sesuatu sesuai dengan fakta yang dilakukan, dialami dan dirasakan. Kejujuran sebagai pondasi utama bagi individu untuk kuat secara moral.

2. Tanggung Jawab

Menanamkan setiap individu untuk memiliki sikap melaksanakan tugas sesuai amanah hingga selesai dengan berani menanggung resiko atas apa yang telah dilakukannya.

3. Disiplin

Menanamkan setiap individu untuk membangun ketaatan pada aturan yang berlaku, memegang suatu prinsip yang menyatakan kebenaran, dan kemampuan dalam merencanakan waktu dengan sebaik-baiknya.

³⁴Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, *Op.Cit.*, hlm. 69.

4. Sederhana

Menanamkan setiap individu untuk membangun sikap dan perilaku yang tidak berlebihan pada sesuatu, melainkan lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya yang didasari pada sikap mental rendah hati.

5. Mandiri

Menanamkan setiap individu untuk memiliki sikap tidak bergantung dengan orang lain melainkan melalui usaha sendiri agar dapat mengatur hidupnya sendiri dan orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya kelak.

6. Kerja Keras

Menanamkan setiap individu untuk membangun sikap yang gigih dan memiliki motivasi yang tinggi untuk pantang menyerah dalam keadaan apapun sehingga muncul kesungguhan untuk melakukan upaya terbaik.

7. Adil

Menanamkan setiap individu untuk membangun sikap yang tidak memihak dan netral dengan berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Selain itu membangun sikap individu memperlakukan orang lain sesuai dengan kebutuhan dan hak nya.

8. Berani

Menanamkan setiap individu untuk membangun sikap percaya diri yang besar dalam menghadapi situasi bahaya atau kesulitan apapun. Berani juga diarahkan pada

membangun tekad dengan semangat dalam memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenaran.

9. Peduli

Menanamkan setiap individu untuk memiliki sikap yang dapat membuat segala kesulitan dapat di tanggung secara bersama dan mencari solusi. Peduli juga berupaya memahami dan memperhatikan keadaan orang lain serta lingkungan sekitarnya.

Dalam upaya merubah perilaku dan sikap masyarakat anti korupsi, pendidikan anti korupsi dilakukan melalui proses pembelajaran. Perilaku anti korupsi dimunculkan oleh individu yang didasari oleh adanya intensi (perilaku yang belum terwujud secara nyata) perilaku anti korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Internalisasi nilai-nilai anti korupsi harus memperhatikan pada saat proses pembelajaran yang mencakup melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.³⁵ Proses pembelajaran dalam pendidikan anti korupsi melalui tiga domain. Seperti yang dikemukakan oleh Benyamin S Bloom, proses belajar meliputi ranah kecerdasan intelektual (kognitif), sikap mental (afektif) dan ranah keterampilan (psikomotorik) yang mengubah kemampuan peserta didik dalam hal sebagai berikut :³⁶

³⁵Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI), hlm, 6.

³⁶E. Surachman, 2016, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta), hlm, 59-61.

1. Ranah Kognitif (*Cognitive Domain*)

- a. Pengetahuan, upaya meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan
- b. Pemahaman, upaya meningkatkan kemampuan untuk memahami sesuatu
- c. Aplikasi, untuk meningkatkan kemampuan menerapkan pengetahuan, prinsip atau konsep dalam realitas kehidupan
- d. Analisis, untuk meningkatkan kemampuan berfikir rasional dan logis dalam mengkaji fenomena secara terinci agar memperoleh gambaran utuh
- e. Sintesis, upaya meningkatkan kemampuan menghubungkan antara fakta dan objek tertentu guna mengkonstruksinya agar memiliki arti
- f. Evaluasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta, objek dan permasalahan tertentu.

2. Ranah Afektif (*Affective Domain*)

- a. Penerimaan (*Receiving*), proses peningkatan kesadaran terhadap keberadaan sistem nilai sosial dengan memperhatikan baik/buruk diikuti sikap menerima atau menolak sistem nilai sosial itu.
- b. Respon (*Responding*), memberikan reaksi terhadap sistem sosial budaya yang berkembang dan menimplementasikannya dalam kehidupan
- c. Menilai atau Menghargai (*Valuing*), memberikan penilaian dan memilih baik atau buruknya sistem nilai untuk menerapkan pada sikap dan perilaku
- d. Pengorganisasian (*Organization*), proses memilah dan mengintegrasikan nilai sosial budaya yang dianggap relevan dengan nilai lainnya

- e. Karakterisasi (*Characterization*), proses internalisasi sistem nilai dan pengimplementasian pada sikap dan perilaku sehingga berpengaruh pada gaya hidup dan karakter seseorang.

3. Ranah Psikomotorik (*Psychomotorik Domain*)

- a. Upaya meningkatkan gerak refleks dalam merespon suatu kejadian
- b. Peningkatan melakukan gerakan dasar dari suatu keterampilan
- c. Peningkatan melakukan keterampilan perceptual yang berhubungan
- d. Upaya meningkatkan keterampilan fisik dan melakukan gerakan ekspresif

Melalui aksi komunitas *Future Leader for Anti-Corruption* (FLAC) sebagai wujud pendidikan non-formal dalam menerapkan pendidikan anti korupsi yang dilakukan dengan sasaran generasi muda. Dalam hal ini, konsep pendidikan anti korupsi sebagai suatu proses memberikan pengetahuan dalam memahami persoalan korupsi dan memberikan penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya dalam membentuk karakter generasi muda. Proses belajar dalam pendidikan anti korupsi ini dilakukan dengan melibatkan tiga domain penting menurut Benyamin S Bloom yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Hal ini dilakukan untuk melakukan perubahan di lingkup masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

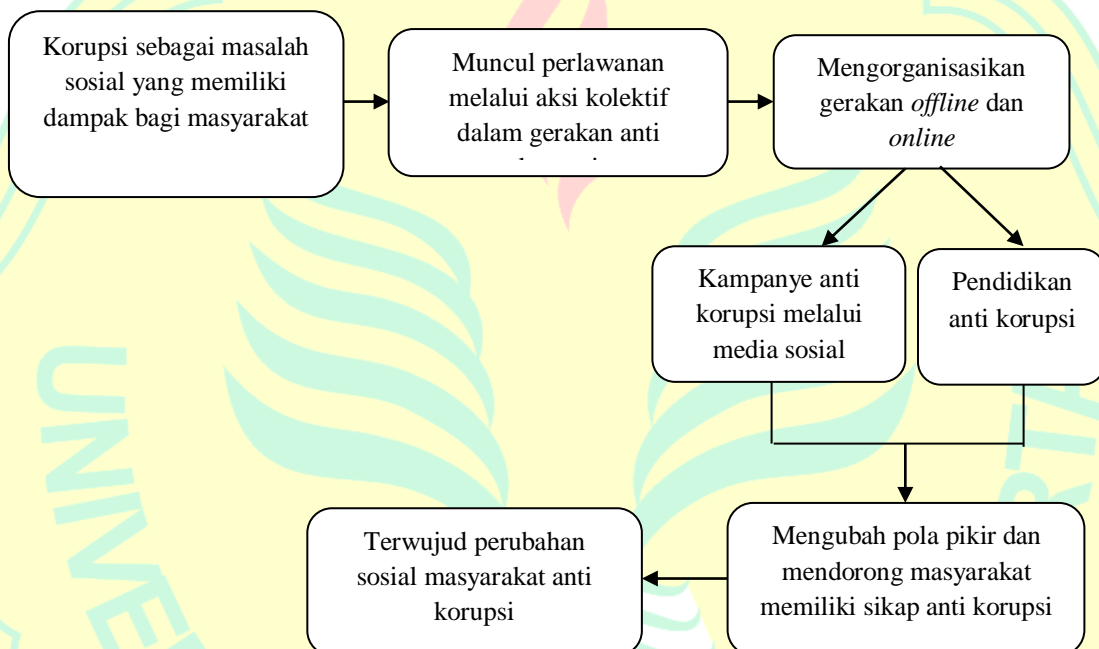
I.6.4 Hubungan Antar Konsep

Sebuah penelitian sebaiknya dibuat secara sistematis sehingga dapat mudah dibaca dan dipahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari kerangka konsep yang telah dipaparkan, secara sederhana peneliti membuat hubungan antar konsep

studi ini pada komunitas *Future Leader for Anti-Corruption* (FLAC) sebagai gerakan sosial anti korupsi melalui pendidikan. Oleh karena itu, dalam bagian ini penulis akan memvisualisasikan hubungan antar konsep dengan penelitian penulis.

Skema I.1

Peta Konseptual Gerakan Sosial Anti korupsi



(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019)

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa korupsi sebagai masalah sosial yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Gerakan sosial anti korupsi melalui pendidikan yang dilakukan oleh komunitas *Future Leader for Anti-Corruption* (FLAC) merupakan hal yang sangat penting. Gerakan ini muncul sebagai bentuk kesadaran kolektif atas permasalahan korupsi yang telah merambah keseluruhan aspek kehidupan masyarakat sehingga. Bangkitnya gerakan anti korupsi sebagai wujud

keasadaran masyarakat dalam melawan korupsi. Dalam gerakan ini, *Future Leader for Anti-Corruption* (FLAC) mengkombinasikan aksi secara langsung maupun melalui dunia maya untuk memberantas korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi sebagai upaya dalam mengubah pola pikir, menginternalisasi nilai anti korupsi, dan mendorong perubahan masyarakat memiliki sikap anti korupsi. Dari kekecewaan masyarakat terhadap masalah korupsi, gerakan ini menjadi harapan dalam mewujudkan perubahan sosial masyarakat anti korupsi.

I.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menekankan pada pencarian data secara detail dari suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha membangun sebuah realitas sosial, di mana peneliti terlibat dan memfokuskan diri untuk melihat interaksi maupun proses yang terjadi pada fenomena maupun subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif berbentuk studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya penulis menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.³⁸

³⁷W.Laurence Neuman, 2003, *Social Research Methods: Qualitative dan Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson Education Inc), hlm. 68.

³⁸ John W. Creswell, 2009, *Research Design Edisi Ketiga (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* diterjemahkan oleh Ahmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.20.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif ini berusaha untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul di masyarakat, situasi tertentu dalam hubungan, kegiatan-kegiatan, hingga proses-proses yang berlangsung. Apabila dilihat dari tujuan penelitian ini adalah mengamati dan memperoleh gambaran tentang *Future Leader for Anti-corruption* sebagai salah satu aktor gerakan sosial yang khusus dalam hal mengedukasi masyarakat terkait anti korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana gerakan tersebut memberikan efek terhadap masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan.

I.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kunci yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini merupakan individu-individu yang secara langsung dan rutin terlibat dalam aktivitas gerakan anti korupsi, yaitu komunitas *Future Leader for Anti-corruption* Jakarta. Subjek penelitian ini di bagi dalam dua kategori informan, yaitu informan utama dan informan pendukung.

Subjek penelitian ini terdiri dari lima orang. Informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang yang merupakan *co-founder* komunitas *Future Leader for Anti-corruption* dan satu orang lainnya yang merupakan ketua komunitas *Future Leader for Anti-corruption*. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah tiga orang informan yang merupakan pengurus inti dari komunitas *Future Leader for Anti-*

corruption. Para informan tersebut dipilih karena dinilai memiliki banyak informasi terkait dengan berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh *Future Leader for Anti-corruption*. Penjabaran terkait dengan informan tersebut dapat dilihat melalui Tabel I.6.

Tabel I.6
Karakteristik Subjek Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	POSISI	Peran dalam Penelitian
1	Jiwo Damar Anarkie	Co-founder komunitas <i>Future Leader for Anti-corruption</i>	Memberikan informasi mengenai sejarah berdirinya FLAC
2	Arif Hermanto	Ketua komunitas <i>Future Leader for Anti-corruption</i>	Memberikan informasi mengenai gambaran umum yang dilakukan Komunitas FLAC
3	Tiyas Putri M	Pengurus inti komunitas <i>Future Leader for Anti-corruption</i>	Memberikan informasi mengenai FLAC dalam menjalankan edukasi anti korupsi
4	M. Rizki Fadhillah	Pengurus inti komunitas <i>Future Leader for Anti-corruption</i>	Memberikan informasi mengenai FLAC dalam menjalankan edukasi anti korupsi
5	Asri Rahayu M	Pengurus inti komunitas <i>Future Leader for Anti-corruption</i>	Memberikan informasi mengenai FLAC dalam menjalankan edukasi anti korupsi

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019)

Karakteristik informan pertamayang dipilih sebagai subjek penelitian yakni Jiwo Damar Anarkie merupakan salah satu pendiri dari komunitas FLAC yang memberikan banyak informasi terkait dengan sejarah berdirinya FLAC. Informan selanjutnya yakni Arif Hermanto sebagai ketua dari komunitas FLAC yang telah bergabung sejak 2016 dan membantu memberikan informasi terkait dengan kegiatan maupun perihal pengorganisasian komunitas. Informan lain yakni Tiyas Putri dan Asri Rahayu M yang juga bergabung sejak 2016 dipilih penulis atas rekomendasi dari ketua komunitas karena mereka terlibat dalam divisi yang mengetahui banyak

informasi seputar pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh FLAC. Informan yang terakhir yakni M. Rizki Fadhillah bergabung sejak 2017 dipilih karena Rizki terlibat dalam divisi yang mengetahui seputar *digital campaign* dari komunitas FLAC.

I.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini terbatas pada komunitas *Future Leader for Anti-corruption* (FLAC) Jakarta. Alasan penulis memilih lokasi penelitian Jakarta karena komunitas *Future Leader for Anti-corruption* (FLAC) membangun awal gerakannya di lokasi tersebut dan kepengurusannya yang aktif. Lokasi Jakarta juga merupakan tempat yang sering digunakan oleh para aktor gerakan dalam melakukan konsolidasi dan mengadakan pertemuan-pertemuan. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2018 sampai dengan April 2019.

I.7.3 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian secara kualitatif adalah untuk mengumpulkan data-data yang telah ada di dalam instrumen untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai personal dan asumsi-asumsi yang ditemui di lapangan dan akan memengaruhi hasil akhir dari penelitian.³⁹ Peran peneliti sebagai orang luar pengumpul data dan pengamat yang terlibat langsung dalam kegiatan komunitas *Future Leader for Anti-corruption*. Peneliti berusaha mencari informasi mengenai gerakan anti korupsi melalui pendidikan dengan mewawancarai informan sebanyak lima orang dari

³⁹John W. Creswell, 2014, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.59.

komunitas *Future Leader for Anti-corruption* dan tiga orang sebagai triangulasi data. Demi memperoleh data dan mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka dalam hal ini penulis harus dapat membatasi diri agar tidak terjadi penelitian subjektif yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, secara tidak langsung peneliti memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, menganalisis berbagai data-data dengan teori yang relevan sesuai dengan penelitian yang terkait.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa teknik diantaranya.

1. Observasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan guna mengamati aktivitas, perilaku setiap individu serta objek yang diamati pada saat penelitian. Dalam menggunakan teknik observasi, penulis juga berada bersama partisipan. Berada bersama akan membantu penulis memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap ketika dilakukan teknik lain seperti wawancara.⁴⁰

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung pada komunitas *Future Leader for Anti-corruption* daerah Jakarta terkait dengan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dalam

⁴⁰J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), hlm.112.

melaksanakan gerakan anti korupsi melalui pendidikan. Selain itu, peneliti mengikuti sekaligus melihat aktifitas komunitas tersebut dalam melakukan gerakan anti korupsi di sekolah-sekolah serta melakukan pengamatan langsung kepada masyarakat yang memperoleh edukasi untuk mengetahui keefektifan kegiatan yang dilakukan komunitas tersebut.

2. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara guna mengumpulkan dan mendapatkan data yang beragam dari beberapa informasi sesuai dengan konteks dan situasi. Sebelum peneliti turun ke lapangan, langkah yang dilakukan terlebih dahulu penulis membuat pedoman wawancara yang memuat beberapa pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis guna memperoleh data dalam memperkuat penelitian ini. Peneliti melakukannya dengan wawancara mendalam yang bersifat terbuka untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan. Dengan wawancara mendalam juga memberikan keleluasaan kepada informan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti agar informan tidak merasa tertekan dalam menjawab pertanyaan peneliti secara langsung antara peneliti dengan informan.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang didapat melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil segala macam bentuk data untuk mendukung penelitian yang berupa artikel, gambar, data keanggotaan, hasil rekaman, memo dan *fieldnote*. Hal tersebut dilakukan guna menjadi data pendukung bagi laporan penelitian selain dari hasil wawancara dan observasi dengan para pengurus komunitas *Future Leader for Anti-corruption*.

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis melalui jurnal, tesis, disertasi, buku-buku hingga dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data sekunder adalah berkas-berkas yang dimiliki oleh komunitas *Future Leader for Anti-corruption*. Penulis juga mendapatkan dokumentasi berupa foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui koleksi foto dari pengurus komunitas, website serta media sosial resmi yang mereka miliki. Selain itu, jurnal, tesis, disertasi hingga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi tinjauan penulis ini di dapat dari website Portalgaruda.org, lib.ui.ac.id, perpustakaan nasional, perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) serta perpustakaan Universitas Indonesia (UI).

I.7.5 Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya yang penting untuk dilakukan setelah mengumpulkan dan memproses data dalam proses penelitian adalah analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data kualitatif yang diperkaya oleh studi literatur yang ekstensif. Data yang telah di peroleh melalui observasi yang telah dimuat dalam catatan lapangan maupun dari dokumentasi yang ada, kemudian data yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam hingga tahap selanjutnya akan di analisis oleh penulis dengan cara interpretasi ke dalam suatu abstraksi dan kerangka pemikiran tertentu. Hasil observasi dan wawancara merupakan suatu data primer yang akan dianalisa oleh data sekunder dari konsep-konsep yang sesuai dan berasal dari buku.

I.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi data pada dasarnya merupakan salah satu strategi atau cara yang tepat dalam membuktikan keabsahan sebuah penelitian. Perlu ada jaminan apa yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian merupakan suatu intrepetasi yang tepat dalam artian bahwa informasi yang di dapatkan adalah sebuah fakta terhadap suatu fenomena atau gejala. Mathinson menjelaskan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperolehn *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi oleh karena itu dengan meggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten,

tuntas dan pasti.⁴¹ Dalam triangulasi data, peneliti bermaksud untuk menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dikomparasikan dengan data dari sumber lain. Dalam proses triangulasi data ini, penulis akan melakukan triangulasi untuk menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dikonfirmasi kesesuaian datanya dengan sumber lain. Peneliti melakukan triangulasi data kepada masyarakat dan sekolah yang memperoleh kegiatan pembelajaran pendidikan anti korupsi FLAC yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Triangulasi Data

No	Nama	Keterangan
1	Abi Dzar A	Peserta Gerak
2	Fikram	Peserta Gerak
3	Wuri Handayani	Guru SD Pasir Gunung

(Sumber: Diolah dari Hasil Observasi, 2019)

I.7.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian merupakan suatu engantar yang digunakan untuk menjelaskan alur logika yang mendasari penulisan penelitian. Dalam hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami isi penelitian ini secara menyeluruh. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian ini, penulisannya akan di bagi menjadi lima bab yang terdiri :

⁴¹John W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm 241.

Bab I : Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang penelitian, penulis menggambarkan masalah yang akan di bahas. Selanjutnya permasalahan penelitian memberikan batasan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yang dimuat dalam beberapa pertanyaan yang akan di jawab dan diulas pada bab-bab selanjutnya secara jelas dan menyeluruh. Dalam tujuan dan manfaat penelitian, penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, kerangka konseptual, penulis menjabarkan teori yang akan digunakan dalam membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada sistematika penulisan, penulis memberikan gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas dari keseluruhan penelitian ini.

Bab II : Dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang gambaran umum komunitas *Future Leader for Anti-corruption*. Kemudian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai profil dari komunitas *Future Leader for Anti-corruption* yang dijelaskan dalam subbab-subbab terdiri dari sejarah terbentuknya, pandangan komunitas terhadap korupsi, visi dan misi, tujuan, struktur kepengurusan, keanggotaan komunitas *Future Leader for Anti-corruption*, sumber dana, program kerja hingga jaringan komunitas *Future Leader for Anti-corruption*.

Bab III : Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil temuan penelitian yang ada dalam komunitas dengan menguraikan secara rinci gerakan anti korupsi meliputi Tujuan, pelaksanaan pendidikan, unsur pembentuk, implikasi serta faktor pendukung dan penghambat dari gerakan sosial anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas *Future Leader for Anti-corruption*.

Bab IV : Dalam bab ini penulis menganalisis data penelitian tentang gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh komunitas *Future Leader for Anti-corruption* sebagai gerakan sosial baru menurut Nelson A. Pichardo.

Bab V : Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian akan di buat secara rinci. Setelah itu, peneliti akan memberikan saran terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan. Hal ini berusaha untuk mempermudah pembaca dalam memahami intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.